

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses perpindahan kelompok manusia dari suatu tempat ke tempat lain seperti perpindahan penduduk dari desa ke kota sering disebut urbanisasi (Shinta, 2024). Alasan besar penduduk melakukan urbanisasi adalah kota selalu dianggap dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Anggapan ini berdasarkan pada masyarakat yang melihat keberadaan sektor industri, perbelanjaan, perkantoran banyak berdiri di daerah kota. Menurut Gilbert *et al.* (1996) dalam bukunya yang berjudul urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga, banyak penduduk perkotaan tetap berkesinambungan dengan masyarakat pedesaan tempat mereka dibesarkan dulunya. Mereka berhubungan akrab dengan desa dan rasa memiliki terhadap desa, sesekali mereka mengunjungi tanah kelahirannya yaitu di desa, namun terkecuali pada sekelompok orang urbanisasi yang telah memiliki kekayaan di perkotaan, mereka enggan untuk kembali ke desa bahkan akan menetap di perkotaan. urbanisasi membawa dampak signifikan terhadap ketersediaan pangan yang semakin meningkat sehingga perkotaan harus memenuhi pasokan pangan sehat dan terjangkau dengan mencari solusi yang kreatif (Gea *et al.*, 2025).

Kepadatan penduduk yang berekor dari arus urbanisasi besar-besaran memberikan pengaruh pada lapangan pekerjaan. Persaingan ketat dan kuota pekerjaan yang sedikit, menimbulkan suatu permasalahan baru yaitu pengangguran. Banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan berakhir menganggur sehingga tidak ada pendapatan juga dapat menimbulkan kemiskinan dan kurangnya kemampuan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Letak geografis 7°9'-7°21' Lintang Selatan dan 112° 36' – 112° 54' Bujur Timur. Kota Surabaya berbatasan dengan Selat Madura di utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di selatan, dan Kabupaten Gresik di barat. Kota ini termasuk kota padat penduduk yang dimana diimbangi dengan banyaknya industri yang berdiri dan pemukiman warga yang semakin banyak. Pertanyaan tersebut didukung oleh data BPS Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur tahun 2022 sebagai berikut :

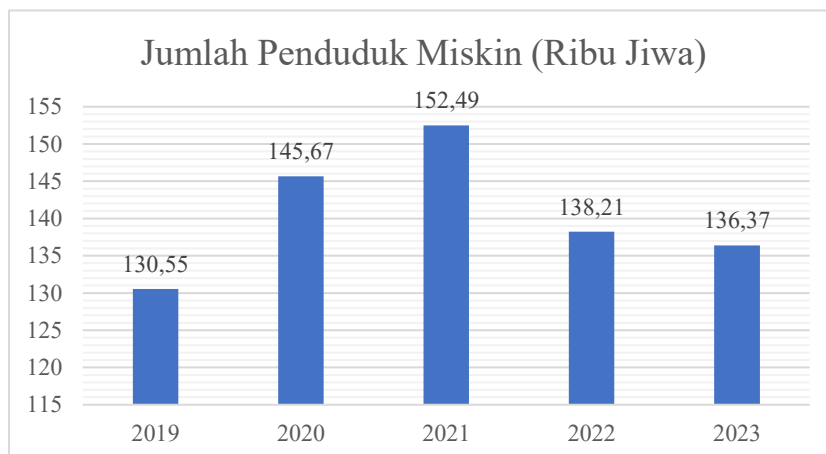
Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten atau Kota dan Jenis Kelamin 2022.

Kabupaten/Kota se Jawa Timur	Penduduk/Populasi (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kabupaten Malang	1.353.154	1.332.746	2.685.900
Kabupaten Jember	1.279.947	1.287.771	2.567.718
Kabupaten Sidoarjo	1.058.552	1.044.849	2.103.401
Kota Surabaya	1.431.041	1.456.182	2.887.223

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Berdasarkan data tabel 1.1, Kota Surabaya menjadi satu-satunya kota dalam Provinsi Jawa Timur yang populasinya paling banyak mencapai 2.887.223 jiwa. urbanisasi yang terus menerus sehingga penduduk baru membutuhkan tempat tinggal yang berujung alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Penggunaan lahan yang semakin luas, dibandingkan dengan ketersediaan luas lahan yang terbatas mendorong terjadinya transformasi lahan dari lahan pertanian ke lahan non-pertanian (Farida *et al.*, 2017), akibatnya adalah pengurangan lahan yang bisa ditanami komoditas pangan. Kecenderungan pola pikir masyarakat yang konsumtif gambaran masyarakat perkotaan yang diukur dari wujud atau tolak ukur kemapanan disebabkan kebutuhan dan keinginan yang tinggi (Basunanda, 2020). Tahun 2024, jumlah penduduk di Kota Surabaya dari keseluruhan kelompok umur dan jenis kelamin tercatat sebanyak 3.142.248 (BPS, 2025).

Kesulitan bekerja akibat lapangan pekerjaan rendah sedangkan tuntutan kebutuhan pokok yang setiap harinya dibutuhkan, namun tidak dapat terpenuhi menjadi tolak ukur kemiskinan.



Gambar 1. 1 Data Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kota Surabaya, 2023

Berdasarkan gambar 1.1, diketahui bahwa dari tahun 2019 hingga 2021 tingkat kemiskinan di Kota Surabaya meningkat. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan berada pada angka 130,55%, tahun 2020 meningkat menjadi 145,67%, dan di tahun 2021 meningkat mencapai angka 152,49%. Kemiskinan di Kota Surabaya di tahun 2022 tercatat menurun mencapai angka 138,21% dan pada tahun 2023 sedikit menurun menjadi 136,27%. Angka kemiskinan yang masih tinggi menandakan bahwa masyarakat belum sejahtera, sebaliknya jika angka kemiskinan rendah menunjukkan bahwa masyarakat sejahtera.

Dikutip dari website BPK Provinsi Jawa Timur (<https://jatim.bpk.go.id/kota-surabaya/>), secara administratif Surabaya dibagi menjadi 160 kelurahan dan 31 kecamatan yang terbagi dalam 5 wilayah, yaitu Surabaya Barat, Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Pusat, dan Surabaya Timur. Surabaya merupakan kota multi-etnis yang kaya akan budaya. Beragam etnis ada di Surabaya, seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. Etnis

Nusantara pun banyak dijumpai, seperti Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi yang membaaur dengan penduduk asli Surabaya sehingga membentuk suatu sistem pandangan budaya menghargai perbedaan dan menerima keberagaman yang selanjutnya menjadi ciri khas kota Surabaya. Sebagian besar masyarakat Surabaya adalah suku Jawa dan suku Madura.

Salah satu wilayah Surabaya yang banyak diduduki oleh 2 suku Jawa dan Madura yaitu Surabaya Utara. Wilayah Surabaya Utara berbatasan dengan Selat Madura di utara dan timur. Hal ini mengakibatkan banyak penduduk berasal dari Pulau Madura bermukim di Surabaya Utara sehingga jumlah penduduk di wilayah tersebut meningkat. Peningkatan ini juga mengakibatkan ketersediaan lahan kosong untuk bertani tergeser menjadi pemukiman warga.

Tabel 1. 2 Data Banyaknya Penduduk Per Kecamatan di Kota Surabaya Wilayah Utara tahun 2022.

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
Simokerto	92.832
Semampir	181.226
Bulak	46.350
Krempangan	114.674
Kenjeran	177.561
Pabean Cantikan	74.810

Sumber : Dukcapil Kota Surabaya, 2023 (diolah)

Tabel 1.2 berisikan data jumlah penduduk wilayah Surabaya Utara yang dimana Kecamatan Semampir menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi berjumlah 181.226 jiwa, disusul dengan Kecamatan Kenjeran berjumlah 177.561 jiwa, dan Kecamatan Krempangan 114.674 jiwa. Jumlah penduduk yang padat dari ketiga kecamatan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan di wilayah tersebut juga harus diperhatikan.

Ketahanan pangan adalah salah satu solusi kreatif dalam pembangunan berkelanjutan perkotaan, terutama di wilayah yang sedang mengalami peningkatan

jumlah penduduk secara pesat (Gea *et al.*, 2025). Kerawanan pangan juga mungkin dialami oleh lapisan masyarakat perkotaan karena ketergantungan pasokan dari luar wilayah sangat tinggi. Keterbatasan akses pangan yang sehat dan bergizi, ditambah dengan ketergantungan pada rantai pasok pangan dari luar kota semakin memperburuk masalah ketahanan pangan. Banyak dijumpai di beberapa lapak menjual sayur dengan kualitas rendah dan terkontaminasi berbagai organisme pembusuk, selain itu dampak negatif yang melekat pada produk pertanian akibat penggunaan pestisida berlebihan. Petani sayuran mendorong produktifitas cepat untuk memenuhi permintaan pasar sehingga menggunakan pupuk kimia dan pestisida agar sayuran cepat panen dan hasilnya dapat memenuhi permintaan pasar.

Ketahanan pangan masih menjadi isu krusial dan menjadi fokus pemerintah terutama di Kota Surabaya. Negara maju seperti Indonesia, ketahanan pangan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan juga disebutkan dalam Undang-Undang tersebut sebagai tanggungjawab pemerintah dan masyarakat, untuk mencapai ketahanan pangan tersebut pemerintah menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan segala upaya untuk mewujudkan cadangan pangan nasional (Undang-Undang RI, 2012).

Populasi yang terus meningkat dan ketersediaan pangan yang menipis, memicu perkembangan Program Pertanian Perkotaan yang dimana dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan pangan di Kota Surabaya. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2016 Pasal 12 Ayat 2 terkait Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya pada bagian kelima bidang pertanian mengenai seksi pengembangan pertanian perkotaan menyebutkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya mengatur tentang rencana anggaran seksi pengembangan pertanian perkotaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan program hingga melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pertanian perkotaan. Dalam pelaksanaannya melibatkan pengalaman, kompetensi yang terampil, pola pikir yang berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperbaiki kualitas hidup dan kemakmuran penduduknya.

Program pertanian perkotaan (*urban farming*) merupakan bentuk kegiatan budidaya pertanian yang memadukan pertanian dalam arti yang luas (*integrated farming*) atau kegiatan pertanian dalam arti sempit (*agriculture farming*) pada lahan pertanian yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan pangan (Septya *et al.*, 2022). Menurut Parsudi *et al.* (2019), pertanian perkotaan adalah aktifitas pertanian di dalam atau di wilayah perkotaan yang melibatkan keterampilan, keahlian, dan inovasi dalam budidayanya. Menurut Junainah *et al.* (2016), manfaat yang didapatkan dengan kegiatan *urban farming* ini dapat membantu mengatasi kemiskinan akibat pengangguran yang disebabkan oleh urbanisasi.

Pemerintah Kota Surabaya berupa meningkatkan produktivitas lahan kosong yang dihadapkan dengan berbagai tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Peran pertanian perkotaan diharapkan mampu, meningkatkan perekonomian masyarakat, memperbaiki ekologi kota dan mempertahankan nilai

sosial budaya Indonesia khususnya di kota Surabaya. Model pengelolaan *urban farming* yang dapat dilaksanakan yaitu hidroponik, aquaponik, aeroponik, vertikultur, dan lain sebagainya. Komoditas yang dibudidayakan juga bervariasi, tidak hanya komoditas sayuran, namun beberapa tempat *urban farming* telah membudidayakan komoditas buah-buahan.

Model pengelolaan *urban farming* dapat dipahami sebagai suatu kerangka konseptual dan praktis yang mengatur jalannya kegiatan pertanian di wilayah perkotaan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Model ini tidak hanya menekankan pada praktik budidaya tanaman di lahan sempit, pekarangan rumah, atau ruang terbuka kota, melainkan juga mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi yang terstruktur agar kegiatan *urban farming* mampu memberikan manfaat yang optimal. Keberadaan model pengelolaan sangat penting karena *urban farming* di perkotaan umumnya berhadapan dengan keterbatasan ruang, tingginya tekanan konversi lahan, serta kompleksitas kebutuhan masyarakat urban yang terus berkembang. Melalui pengelolaan yang baik, kegiatan *urban farming* dapat diintegrasikan dengan program pemerintah daerah, dukungan komunitas, serta partisipasi masyarakat, sehingga menciptakan sinergi antar aktor dalam mewujudkan ketahanan pangan kota. Selain itu, model pengelolaan juga berfungsi sebagai pedoman bagi pemanfaatan sumber daya lokal secara lebih efektif, termasuk dalam hal penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil, hingga akses pemasaran, agar *urban farming* tidak berhenti pada skala rumah tangga, tetapi mampu berkembang sebagai sistem pertanian perkotaan yang produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, model pengelolaan *urban farming* bukan hanya instrumen teknis, melainkan juga

strategi yang menghubungkan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam satu kesatuan yang mendukung pembangunan kota yang resilien dan berdaya saing.

Terdapat tiga dimensi dalam praktik *urban farming* yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Ketiga dimensi ini sangat membutuhkan banyak dukungan dan peran aktif dari masyarakat dan lembaga berwenang khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya mendampingi masyarakat untuk di ajarkan menyediakan pangan dan memperkuat ketahanan pangan di wilayahnya. Dukungan serta pengelolaan yang baik juga menjadi faktor penting yang dapat menunjang keberhasilan dalam kegiatan *urban farming*.

Pengelolaan pertanian perkotaan (*urban farming*) dalam konsep sosial membutuhkan partisipasi dari masyarakat sekitar yang terdapat lahan kosong untuk dimanfaatkan sebagai lahan produktif. Praktik pertanian perkotaan atau *urban farming* ini dilakukan secara berkelompok membentuk kelompok tani yang berasal dari satu lingkungan pemukiman. Jumlah anggota kelompok tani berbeda-beda berdasarkan kemauan dari warga setempat yang bersedia menjalankan praktik *urban farming* di daerahnya masing-masing. Sisi sosial pertanian perkotaan, partisipasi ini dapat memperkuat solidaritas, menciptakan ruang interaksi antar warga, serta memberdayakan kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan. Beberapa wilayah di Kota Surabaya, masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pertanian perkotaan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kegiatan pertanian perkotaan sering kali menjadi solusi untuk mengurangi keterasingan sosial yang sering dialami oleh masyarakat perkotaan. Adanya kebun komunitas atau proyek bersama,

masyarakat dapat membangun jejaring sosial yang lebih erat dan saling mendukung.

Pertanian perkotaan dinilai berdasarkan aspek lingkungan memberikan manfaat, seperti meningkatkan kualitas tanah dan udara serta pengurangan jejak karbon karena banyaknya kendaraan dan industri melalui penyerapan oleh tanaman pertanian. Selain itu, praktik pertanian perkotaan juga menghadirkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang produktif di tengah kota untuk menurunkan efek rumah kaca sehingga lingkungan lebih sehat dan nyaman. Limbah sisa praktik pertanian perkotaan dapat dikelola kembali menjadi pupuk kompos maupun pakan ikan dan ayam. Penggunaan barang daur ulang juga banyak dimanfaatkan sebagai hiasan kebun maupun pot tanaman.

Pertanian perkotaan juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan aspek ekonomi masyarakat. Preferensi masyarakat terhadap *urban farming* sangat bervariasi tergantung pada apa yang diinginkan masyarakat itu sendiri. Ada beberapa masyarakat yang menginginkan hasil dari *urban farming* dijual untuk membantu kebutuhan ekonomi rumah tangganya, adapun masyarakat yang melakukan kegiatan *urban farming* untuk dikonsumsi sendiri (Rachmatullah *et al.*, 2016). Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, adanya praktik *urban farming* ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan pemberdayaan masyarakat seperti budidaya tanaman, produksi pupuk organik, pengelolaan hasil pertanian yang menjadi sumber pendapatan bagi beberapa masyarakat seperti ibu-ibu rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti model pengelolaan pertanian perkotaan yang berkelanjutan dalam aspek sosial,

lingkungan, dan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok tani *urban farming* di Kota Surabaya. Sehingga diperlukan menelaah kembali terkait pelaksanaan dan strategi untuk mengembangkan pertanian perkotaan agar mewujudkan ketahanan pangan di Kota Surabaya. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji mengenai ***“Analisis Model Pengelolaan Urban Farming dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Surabaya”***. Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui model pengelolaan *urban farming* yang telah lama dijalankan oleh masyarakat dengan bimbingan dari Pemerintah Kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Kota Surabaya merupakan salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun akibat arus urbanisasi. Ketersediaan bahan pangan di Kota Surabaya ikut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduknya. Pemerintah mengupayakan program pertanian perkotaan yang dimana hal tersebut diharapkan mampu membantu perekonomian dan ketersediaan bahan pangan masyarakat dengan melihat kondisi keterbatasan lahan pertanian. Model pengelolaan *urban farming* dapat dipahami sebagai suatu kerangka konseptual dan praktis yang mengatur jalannya kegiatan pertanian di wilayah perkotaan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Model ini tidak hanya menekankan pada praktik budidaya tanaman di lahan sempit, pekarangan rumah, atau ruang terbuka kota, melainkan juga mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi yang terstruktur agar kegiatan *urban farming* mampu memberikan manfaat yang optimal. Pengelolaan *urban farming* dalam konsep sosial berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang mengelolanya. Selain konsep sosial, adapun konsep lingkungan yang menyorot pengelolaan limbah dan efek dari

kegiatan *urban farming* bagi lingkungan. Konsep ekonomi juga ada keterkaitan keduanya yang hasilnya mampu mengurangi implementasi dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengelola pertanian perkotaan tersebut. Beberapa model pengelolaan *urban farming* digunakan tergantung pada tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat yang mengelola maupun yang terdampak oleh kegiatan ini. Perbedaan tujuan ini menimbulkan faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya kegiatan *urban farming* yang dikelola oleh masyarakat Kota Surabaya. Model pengelolaan *urban farming* bukan hanya instrumen teknis, melainkan juga strategi yang menghubungkan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam satu kesatuan yang mendukung pembangunan kota yang resilien dan berdaya saing.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan model pengelolaan pertanian perkotaan (*urban farming*) di Kota Surabaya ?
2. Bagaimana pengelolaan pertanian perkotaan (*urban farming*) di Kota Surabaya berdasarkan aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi ?
3. Bagaimana strategi pengelolaan pertanian perkotaan (*urban farming*) yang tepat untuk mewujudkan ketahanan pangan di kota Surabaya ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penerapan model pengelolaan pertanian perkotaan (*urban farming*) yang dilakukan di Kota Surabaya.

2. Menganalisis pengelolaan pertanian perkotaan (*urban farming*) di Kota Surabaya berdasarkan aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi.
3. Merumuskan strategi pengelolaan pertanian perkotaan (*urban farming*) yang tepat untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat

Pada setiap penelitian, memiliki manfaat yang baik dan dapat di implementasikan untuk setiap kegiatannya. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti, sangat bermanfaat sebagai sarana mengintegrasikan pengetahuan sekaligus wadah latihan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama proses kuliah. Selain itu, pelaksana tugas untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bagi kelompok tani *urban farming*, dapat menambah pemahaman maupun wawasan dalam mengelola *urban farming* di Kota Surabaya agar semakin maju dan memberikan dampak baik bagi pembangunan kota berkelanjutan.
3. Bagi instansi terkait, dapat menjadi masukan dalam merumuskan strategi dan kebijakan pengelolaan agribisnis perkotaan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Surabaya.
4. Bagi Perguruan Tinggi, sebagai referensi atau sumber literatur dan tambahan pengetahuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik *urban farming* dalam mewujudkan ketahanan pangan.